

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo., 2005, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Achmad Ali., 2002, *Menguak Teori Hukum*, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al. Wisnubrot, 2014, *Praktek Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung.
- Ali Purwito, 2010, *Kepabeanan Dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang*, Kajian Hukum Fiskal FHUI bekerjasama dengan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Ali Purwito dan Indriani., 2015, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2006, *KUHP dan KUHP*, Cet. 13, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Pidana Indonesia Dan Perkembangan*, PT. Sofmedia, Medan.
- , 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis., 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Antonius Soedjata., 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Azis Syamsuddin., 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Bambang DwiBaskoro., 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bambang Sunggono., 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo., 2006, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Cet. I, Sumber Ilmu, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- , 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Semarang
- Dhofir Catur Bashori., 2015, *Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Pemilukada Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Djisman Samosir., 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika., 1988, *Kedudukan Jaksa dalam Hukum Pidana*, Cet. 1, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai., 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Seri 2, Bina Ceria, Jakarta.
- Eddy Rivai., 2002, *Study Tentang Pendekatan Integral Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung*, (Disertasi), Universitas Indonesia, Jakarta.
- Elfrida Gultom, 2007, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.M.A Kuffal, 2007, *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, Cet. 9, UMM Press, Malang.
- H. Rusly Muhamad., 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita., 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Harun M. Husein, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

- H.P. Panggabean., 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori – Praktik dan Yurisprudensi Di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie., 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.
- Kadir Husin dan Budi RizkiHusein., 2016, *SistemPeradilanPidana di Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta.
- Lexy J. Moleong., 2006, *MetodologiPenelitianKualitatif*, RemajaRosdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi., 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia., 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Marwan Effendy., 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro., 2002, *Korupsi dalam Sistem Hukum, Mencuri Uang Rakyat: Kajian Korupsi di Indonesia*. Ed. Hamid Basyaib, Richard Holloway, dan Nono Anwar Makarim, Aksara Foundation, Jakarta.
- ., 2007, “*Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)*”. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta.
- ., 2007, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*”. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta.
- M. Karjadi dan R Soesilo., 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaDenganPenjelasanResmi dan Komentari*, Politeia, Bogor.
- M. Manullang., 2012, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- M. Yahya Harahap., 2009, *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ., 2013 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi., 2008, *Metode Penelitian Survei*, Cet. XIX, LP3ES, Jakarta.
- Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan.
- Moh. Nazir., 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi., 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki., 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purnomo Murtopo, 2011, *Susunan Satu Naskah 7 (tujuh) Undang-undang Kepabebean Dan Cukai Beserta Penjelasannya*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- R.M. Surachman dan Andi Hamzah., 1996, *Jaksa di Berbagai Negara, Peran dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmat Trijono., 2015, *Penelitian Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Ratna Nurul Afiah., 1988, *Barang bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan HR., 2009, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro., 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ryan Firdiansyah Suryawan., 2013, *Pengantar Kepabebean, Imigrasi dan Karantina*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Safri Nugraha, dkk., 2007, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Center for Good Law and Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang.

Soerjono Soekanto., 2019, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Surono., 2013, *Bahan Ajar Pengantar Cukai*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta.

Surono., 2015, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tim Penyusun Pusat Bahasa., 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 Cet 3, Balai Pustaka, Jakarta.

W.M. Herry Susilowati., 2012, *Laporan Penelitian Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Yan Pramadya Puspa, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Akademika Presido, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang., 2004, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakaan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung.

Yohanes Yahya., 2006, *Pengantar Manajemen*, Graham Ilmu, Yogyakarta

Yudi Kristiana., 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang *Kepabeanan*; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksanaan Republik Indonesia*; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-002/A.JA/5/2017 tentang *Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*.

----- Nomor 03/PMK.06/2011 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi*.

----- Nomor 39/PMK.04/2014 Tentang *Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai negara*

----- Nomor 13/PMK.06/2018 tentang *Lelang Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksanaan Republik Indonesia*.

Keputusan Jaksa Agung RI (KEPJA) Nomor: KEP-089/J.A/09/1988 Tentang *Penyelesaian Barang Rampasan*

----- Nomor Kep-518/A/JA/1 1/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang *Perubahan KEPJA RI Nomor Kep-132/JA/1 1/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Tindak Pidana*.

Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-002/A/JA/1/2010 tentang *Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Kejaksanaan RI Tahun 2010-2015*

C. Jurnal dan Website

Abdul Rokhim., 2013, “*Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*”, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, FH Unisma Edisi Pebruari-Mei 2013, Malang.

B. Arief Sidharta., 2005, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", edisi 3 Tahun II, November 2005, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta.

Ramelan, *Profesionalisme Jaksa di Era Supremasi Hukum*, (Makalah disampaikan pada Seminar Perspektif Peran Kejaksaan dalam Era Supremasi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 3 Agustus 2000).

Anonymous, "Perbedaan Antara Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara", melalui www.hukumonline.com.

Denny Pratama, "Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Palembang", www.eprints.undip.ac.id.

Lamria Sianturi, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Kejaksaan Studi Pada KPKNL Medan", melalui www.researchgate.net.

Sofia Hasanah, "Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara", www.hukumonline.com.

<https://www.beacukai.go.id/berita/aksi-petugas-bea-cukai-di-berbagai-daerah-gagalkan-bermacam-modus-peredaran-rokok-dan-miras-ilegal.html>.

<https://www.beacukai.go.id/berita/tambah-daftar-panjang-penindakan-bea-cukai-bengkalis-kembali-gagalkan-penyelundupan-rokok-ilegal-dan-barang-elektronik.html>.

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3

<https://kejari-padang.kejaksaan.go.id/kasi-b-bukti-dan-b-rampasan/>

<https://www.mascargoexpress.com/pengertian-barang-ilegal/>.

<https://www.republika.co.id/berita/qhd9xb380/bea-cukai-musnahkan-barang-ilegal-miliaran-rupiah>